

### BAB III

## SEJARAH PEMBANGUNAN DAN DINAMIKA FUNGSI PASANGGRAHAN KOTANOPAN (1930-2013)

### A. Sejarah Pasanggrahan Kotanopan

#### 1. Latar Belakang Pembangunan Pasanggrahan

Pendudukan Belanda di Mandailing bermula pada tahun 1833, ketika pasukan Belanda mendarat di Natal dan kemudian bergerak ke pedalaman hingga mencapai Pakantan dan Mandailing. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda membangun basis militer di Pakantan sebagai upaya untuk menstabilkan wilayah yang telah dikuasai sekaligus memperluas kontrol ke daerah Angkola dan Sipirok. Proses ini menunjukkan bahwa sejak awal, penguasaan atas Mandailing tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga disertai dengan pembangunan sarana fisik sebagai instrumen pengendalian politik dan teritorial<sup>1</sup>.

Setelah kekuasaan kolonial semakin menguat, pusat administrasi Mandailing-Angkola dipindahkan ke Panyabungan pada tahun 1838 melalui pembentukan jabatan *Resident Assistant of Mandailing-Angkola*. Dalam skala yang lebih luas, pembentukan wilayah administrasi kolonial di Sumatra tidak semata-mata ditentukan oleh batas alam, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor topografi, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pembangunan sebuah pasanggrahan di Kotanopan pada tahun 1930 perlu dipahami sebagai

---

<sup>1</sup> Natalia dan Khoiruddin Ritonga "The Influence of Dutch Colonial Architecture: A Case Study of Dutch Heritage Buildings in Langsa City," *Journal Of Samudra Social Studies Research(jsssr)* vol. 3 no.1 (2025), hal. 59-65

bagian dari strategi kolonial dalam menata titik-titik penting dalam jaringan pemerintahan pedalaman Mandailing.

Tapanuli dikenal sebagai wilayah bergunung dan sulit dijangkau, sehingga transportasi menjadi hambatan utama bagi ekspansi ekonomi dan administrasi. *Resident F.C. Vorstman* pada 1921 menegaskan bahwa pembangunan jalan utama merupakan salah satu sarana paling kuat untuk memajukan daerah yang tertinggal secara ekonomi. Infrastruktur menjadi faktor besar dalam integrasi ekonomi Indonesia kolonial, bahkan lebih penting daripada banyak kebijakan Etis dalam mendorong perkembangan wilayah. Pasanggrahan di Kotanopan dibangun bukan sebagai bangunan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fasilitas pendukung mobilitas pejabat, tamu pemerintah, dan arus administrasi di jalur pedalaman<sup>1</sup>.

## 2. Proses Berdirinya Pasanggrahan Kotanopan

Pembangunan Pasanggrahan Kotanopan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Kotanopan sebagai salah satu wilayah yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda di kawasan Mandailing. Jauh sebelum berdirinya bangunan Pasanggrahan pada tahun 1930, Kotanopan telah memiliki posisi penting dalam jaringan pemerintahan kolonial. Pada abad ke-19, wilayah Kotanopan menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian pemerintah kolonial karena kedudukannya dalam penguasaan wilayah Mandailing. Setelah Belanda memperluas kekuasaannya ke kawasan

---

<sup>1</sup> Jeroen Touwen, "Moving towards a National Economy in Late Colonial Indonesia" *Itinerario* vol. 23 (1999)

Mandailing pada masa Perang Padri, Kotanopan berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas administratif kolonial<sup>2</sup>.

Kotanopan juga memiliki posisi geografis yang penting karena berada pada jalur perjalanan yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatra bagian tengah dan utara. Menghubungkan kawasan seperti Padang, Bukittinggi, dan wilayah Tapanuli. Dengan demikian, pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 dapat dipahami dalam konteks perkembangan fasilitas pemerintahan dan perjalanan kolonial pada masa tersebut. Pasanggrahan Kotanopan merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1930. Bangunan tersebut memiliki sejumlah ruang tamu, teras, 11 kamar tidur, kamar mandi, toilet, serta halaman yang luas. Karakteristik fisik tersebut menunjukkan bahwa bangunan sejak awal dirancang bukan sebagai rumah tinggal sederhana, melainkan sebagai bangunan yang mampu menampung kebutuhan tempat tinggal dan persinggahan dalam waktu tertentu.

Pembangunan pada tahun 1930 juga menunjukkan bahwa keberadaan bangunan tersebut merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur kolonial di Kotanopan pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Pada periode tersebut, pemerintah kolonial tidak hanya membangun fasilitas yang berkaitan langsung dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengembangkan berbagai sarana yang mendukung mobilitas pejabat dan perjalanan antardaerah. Pasanggrahan menjadi salah satu bentuk fasilitas tersebut. Secara umum, bangunan pasanggrahan digunakan sebagai tempat persinggahan atau

---

<sup>2</sup> Budi Agustono dan Junaidi, "The Dutch Colonial Economic Policy: Coffee Exploitation in Tapanuli Residency, 1849–1928" *Kemanusiaan* Vol. 25 No. 2 (2018), hal. 49–71

penginapan bagi pejabat pemerintah dan orang-orang yang melakukan perjalanan melalui wilayah tertentu<sup>3</sup>.



**Gambar 3,1 :** Keadaan Pasar Kotanopan yang berada Didepan Pasanggrahan Tahun 1936

( Sumber : <http://hdl.handle.net/1887.1/item:729247> )

Pemilihan Kotanopan sebagai lokasi pembangunan dapat dipahami dari kedudukannya sebagai wilayah administratif yang penting dan sebagai salah satu titik perjalanan menuju wilayah pedalaman. Pada masa kolonial, Kotanopan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Mandailing. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membutuhkan fasilitas yang dapat menunjang keberadaan pejabat serta perjalanan dinas ke wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan Pasanggrahan pada tahun 1930 merupakan bagian dari upaya penyediaan fasilitas fisik yang mendukung sistem pemerintahan kolonial.

Bentuk bangunan Pasanggrahan juga memperlihatkan karakter bangunan kolonial yang menyesuaikan kebutuhan iklim dan fungsi bangunan. Bangunan tersebut memiliki teras, banyak kamar, ruang tamu, ruang belakang, kamar mandi, toilet, dan halaman yang luas. Kelengkapan ruang tersebut menunjukkan bahwa bangunan dirancang untuk digunakan oleh lebih dari satu

---

<sup>3</sup> Dwi Kurnia Sandy “Payakumbuh: Kajian Arkeologi Perkotaan di Keresidenan Pantai Barat Sumatra” *PURBAWIDYA*, vol.14 no.1 (2025), hal. 129-150

orang dan untuk memenuhi kebutuhan penginapan dalam perjalanan. Dengan demikian, aspek arsitektural bangunan dapat dikaitkan dengan fungsi praktisnya sebagai tempat tinggal sementara dan tempat persinggahan.

Proses berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dapat dipahami melalui beberapa tahap. Pertama, adanya perkembangan Kotanopan sebagai wilayah yang memiliki kedudukan administratif dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pemerintahan dan akomodasi bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Ketiga, posisi Kotanopan yang berada pada jalur perjalanan antardaerah menjadikan wilayah tersebut membutuhkan tempat persinggahan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Keempat, kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pembangunan sebuah bangunan yang memiliki ruang cukup banyak dan fasilitas yang mendukung fungsi penginapan. Pembangunan bangunan yang kemudian dikenal sebagai Pasanggrahan Kotanopan tersebut diperkirakan berlangsung pada tahun 1930 berdasarkan sumber sejarah lokal dan penelitian mengenai bangunan tersebut<sup>4</sup>.

Dengan demikian, berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur pemerintahan dan jaringan mobilitas pada masa kolonial Belanda. Bangunan tersebut lahir dalam lingkungan pemerintahan kolonial yang telah menempatkan Kotanopan sebagai salah satu pusat administrasi di kawasan Mandailing. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga dengan

---

<sup>4</sup>Rahmat Kurnia Lubis "Kotanopan: Desa Tua, Bertuah dan Bersejarah di Mandailing Natal," rentak.idSenin, 10 Februari 2025 , <https://rentak.id/kotanopan-desa-tua-bertuah-dan-bersejarah-di-mandailing-natal/> (akses 11 mei 2026)

aktivitas pejabat pemerintahan dan perjalanan antardaerah. Fungsi tersebut kemudian berkembang mengikuti perubahan keadaan politik dan pemerintahan setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 menjadi titik awal penting untuk memahami perubahan fungsi bangunan tersebut sampai periode berikutnya<sup>5</sup>.

### 3. Arsitektur dan Kondisi Awal Bangunan

Pasanggrahan Kotanopan menunjukkan ciri-ciri arsitektur kolonial tropis yang lazim disebut gaya Indis, yang merujuk pada perpaduan elemen arsitektur Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Nusantara. Pasanggrahan Kotanopan memiliki bentuk rumah panggung bergaya tropis Belanda dengan luas lahan yang besar. Ruang tamu yang luas, teras depan, kamar mandi, toilet, dan halaman yang indah. Pasanggrahan Kotanopan, wujudnya lebih berupa bangunan satu lantai dengan ruang-ruang besar dan 11 kamar penunjang, tidak ada satu pun tulisan dalam kumpulan dokumen ini yang menjelaskan secara spesifik kapan peletakan batu pertama, siapa pemborongnya, seperti apa gambar rencananya, berapa biayanya, atau berapa lama pembangunan Pasanggrahan Kotanopan berlangsung dapat di selesaikan.<sup>6</sup>

Dinding kayu putih tebal yang tahan terhadap iklim lembab, atap genteng tinggi untuk ventilasi alami, verandas luas dengan tiang penyangga untuk sirkulasi udara, dan pintu-jendela kayu unik dengan ukiran halus yang mengikuti gaya kolonial Eropa. Tahap konstruksinya yang mengandalkan tenaga kerja masyarakat di bawah sistem kolonial. Perabot kayu dengan motif

---

<sup>5</sup> Dahlan Batubara, "Mandailing Natal Awal Tahun 1900" Selasa, 7 Jun 2022, <https://mandailingonline.com/mandailing-natal-awal-tahun-1900/> (akses 18 mei 2026)

<sup>6</sup> Prabhu dkk "Comprehensive assessment and material analysis of a heritage structure: proposing an effective restoration and retrofitting strategy" *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* vol.25 no.1

Belanda di dalamnya, seperti lemari dan kursi kuno, sebagian masih utuh. *In 1936 werd marmer aangebracht in het Pasanggrahan (gastenverblijf) van Kotanopan – een project dat 15.000 gulden uit de gemeentekas kostte en waarbij lokale arbeiders werden ingezet – terwijl het gastenverblijf op dat moment al klaar was voor gebruik*<sup>7</sup>.

Pengalaman kolonial di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan bangunan publik kerap berlangsung seiring dengan persiapan administratif yang lebih luas. Seperti, pembangunan jalan penghubung mendorong hadirnya gedung-gedung pemerintah dan permukiman dengan tata ruang yang tertata. Pada waktu yang sama, kebutuhan terhadap infrastruktur penting seperti jalan, rel, rumah, gedung pemerintahan, stasiun, rumah sakit, dan sekolah meningkat pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan pasanggrahan di Kotanopan tahun 1930 juga mengikuti logika kolonial yang menempatkan bangunan tersebut sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintahan dan konektivitas para kolonial<sup>8</sup>.

Secara fisik, bangunan tetap kokoh setelah 96 tahun berdiri, dengan 80% elemen orisinal seperti dinding luar, pintu-jendela, dan verandas yang terjaga. Namun, lantai interio diubah menjadi lantai kontemporer untuk kenyamanan penginapan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an, ada beberapa perbaikan kecil, termasuk fokus sanitasi dan cat ulang berkala untuk mencegah pembusukan tropis. Tiga kamar diperbaiki selama Jelajah Sepeda Sabang-

---

<sup>7</sup> “verlichting van Kotanopan voor één nacht, en over het leggen van een marmeren vloer in de pasanggrahan, Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers, 1936,” <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan+pasanggrahan+&page=1&maxperpage=20&coll=ds> (toegang 09 mei 2026)

<sup>8</sup> Arif Sarwo Wibowo “Study of building typology of school constructed during the Dutch Colonial Period in Indonesia. Case study of Hoogere Burgerschool (HBS) in Bandung” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, vol.126 no.1 (2018), hal.1-5

Padang 2013, tetapi secara keseluruhan, fasilitas ini beroperasi sebagai aset milik Pemprov Sumatera Utara.

Jenis bahan yang digunakan pada Pasanggrahan tidak menyebutkan secara rinci. Namun, berdasarkan karakteristik umum bangunan kolonial tropis, bahan yang digunakan cenderung mengutamakan kekuatan struktur, daya tahan terhadap iklim lembap, dan kemudahan pemeliharaan. Bangunan Pasanggrahan yang masih berdiri hingga hari ini menunjukkan bahwa mereka relatif kokoh dan dirancang untuk bertahan lama. Ketahanan fisik ini merupakan salah satu karakteristik penting bangunan kolonial yang dibangun untuk waktu yang lama, terutama untuk bangunan administratif<sup>9</sup>.

Bangunan Pasanggrahan juga mencerminkan keadaan sosial-politik saat kolonial. Bangunan besar dengan halaman luas, banyak kamar, dan fasilitas yang lengkap menunjukkan perbedaan kelas sosial antara pejabat kolonial dan orang-orang yang tinggal di Kotanopan. Dalam masyarakat kolonial, bangunan resmi seperti Pasanggrahan adalah simbol kekuasaan dan kehadiran negara selain fasilitas praktis. Bangunan yang menonjol secara visual di pusat kota atau kecamatan menunjukkan dominasi Belanda dalam tata ruang kota.

Arsitektural Pasanggrahan dapat dianggap sebagai simbol material kekuasaan kolonial. Pasanggrahan Kotanopan bukan sekadar bangunan tua, melainkan artefak sejarah yang merekam bagaimana kolonialisme bekerja melalui ruang, arsitektur, dan infrastruktur. Kajian terhadap proses pembangunannya penting untuk memahami bahwa wilayah Kotanopan

---

<sup>9</sup> Koko Hendri Lubis dkk, *Perintis kemerdekaan di Kotanopan – Mandailing* ( Medan, Hikmah Sumut, PIDM dan Perdana Publishing : 2018 )

ditempatkan dalam struktur kekuasaan Hindia Belanda, sekaligus melihat warisan fisik itu masih bertahan sebagai saksi sejarah hingga sekarang<sup>10</sup>.

## **B. Fungsi Pasanggrahan Kotanopan**

### **1. Masa Penjajahan (1930-1945)**

#### **a. Sebagai Penginapan dan Pendukung Administrasi Pemerintahan Belanda**

Bangunan pasanggrahan di masa Hindia Belanda adalah bagian dari sistem administrasi pemerintahan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memerlukan sarana pendukung yang dapat mendukung mobilitas pejabat pemerintah saat menjalankan tugas di berbagai wilayah. Perjalanan antar daerah membutuhkan waktu yang cukup lama karena luasnya wilayah administrasi dan kondisi geografis Indonesia. Akibatnya, diperlukan tempat persinggahan untuk memastikan aktivitas pemerintahan berjalan lancar. Pasanggrahan berfungsi sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung pemerintahan kolonial dalam perjalanan Belanda selama di kotanopan<sup>11</sup>.

Awal tahun 1900-an pemerintah kolonial mulai memperkuat sistem administrasi di wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, kantor pemerintahan, dan tempat tinggal resmi untuk pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Dengan demikian, kebijakan kolonial mewajibkan pembangunan Pasanggrahan untuk memastikan bahwa wilayah dapat diawasi dengan mudah. Pasanggrahan biasanya dibangun di tempat yang strategis di jalur

<sup>10</sup> Khoirun Nisa dkk, *Sumber Belajar Ppkn Di SD/MI Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)* (Padangsidempuan, Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI) : 2020 ), hal. 26

<sup>11</sup> Handinoto, "Daendels dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda Abad ke-19," *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment* vol.36, no.1 (2008), hal. 43–53.

perjalanan administratif, terutama di tempat-tempat yang memiliki potensi ekonomi dan peran penting dalam pemerintahan kolonial. Salah satu lokasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kotanopan, yang merupakan daerah yang terhubung dengan pusat administrasi Selatan <sup>12</sup>.

Perkembangan kota pada masa kolonial Hindia Belanda mengikuti perkembangan sistem fasilitas pemerintahan kolonial salah satunya bangunan Pasanggrahan. Pasanggrahan Kotanopan itu dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk fasilitas yang membantu birokrasi di Mandailing. Lokasinya di jalur transportasi antar daerah membuat Kotanopan memiliki peran penting dalam sistem administrasi kolonial. Oleh karena itu, Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem administratif pemerintah Hindia Belanda.



**Gambar 3.2 :** Suasana Pasanggrahan Kotanopan Tahun 1936  
( Sumber : <http://bll.handle.net/1887.1/item/729715> )

Sistem birokrasi kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, dibangun secara berjenjang dan memerlukan kerja sama yang kuat antar lembaga. Berbagai sarana pendukung dibangun

---

<sup>12</sup> Dendy Reza Juliansyah Siregar dan Pujiati, “Mengguris Karet, Budaya Penopang Hidup Masyarakat Kotanopan,” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.5, ( 2025 ), hal. 1-8

dalam sistem kolonial pasanggrahan tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat, tetapi juga menjalankan peran birokrasi. Bangunan ini dapat digunakan sebagai tempat pertemuan sementara, untuk menerima laporan administratif, dan untuk melakukan kegiatan pemerintahan di wilayah yang dikunjungi oleh pejabat kolonial.

Adanya Pasanggrahan memungkinkan administrasi dilakukan secara lebih terorganisir. *In de pasanggrahan (het gouvernementsgastenverblijf) van Kotanopan vond een bespreking plaats met de koloniale resident en dr. F.H. Visman – lid van de Raad van Indië en voormalig regeringscommissaris voor bestuurshervorming. Visman reisde destijds door Sumatra om te beoordelen welke stad als hoofdstad van het eiland zou moeten dienen. Volgens de planning zou hij vanuit Kotanopan doorreizen naar Prapat om zich daar bij resident Bouwes Bavinck te voegen.*<sup>13</sup>

Fungsi birokrasi ini menunjukkan bahwa struktur sistem kontrol pemerintahan yang lebih dari sekadar sarana fisik. Pemerintah kolonial memerlukan alat yang dapat menjamin hubungan antara pusat administrasi dan wilayah yang jauh. Sehubungan dengan Pasanggrahan Kotanopan, fungsi birokrasi dapat dikaitkan dengan tugas pemerintahan pejabat kolonial di Mandailing. Selama kunjungan pejabat ke daerah tersebut, bangunan

---

<sup>13</sup> Sumatra Dr. F. H. Visman. Ongesteld Geworden Kotanopam” ft voorgedaan. Zijn toestand maakte het volgens onze inlichtingen nog twijfelachtig of hij wel uit. Kotanopan, waar hij in de pasanggrahan logeert, zou mogen worden getransporteerd. 18 juni 1936, hal 140, di akses 31 mei 2026, [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kotanopan+pasanggrahan+&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=NederlandsIndi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e\\_eeuw%7C19301939%7C&page=1&coll=ddd&identifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&resultsidentifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&rowid=1](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kotanopan+pasanggrahan+&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=NederlandsIndi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C19301939%7C&page=1&coll=ddd&identifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&resultsidentifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&rowid=1)

tersebut dapat digunakan sebagai tempat persinggahan untuk menyelesaikan tugas administratif.

Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat transit bagi pejabat pemerintah Hindia Belanda yang melakukan perjalanan dinas. Ini terjadi karena pemerintah kolonial perlu mengawasi berbagai wilayah administrasi yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi transportasi tidak secepat sekarang. Terbatasnya pilihan transportasi, perjalanan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membangun beberapa tempat persinggahan untuk membantu pejabat pemerintah dalam perjalanan.

Bangunan Pasanggrahan biasanya memiliki fasilitas dasar seperti ruang istirahat dan ruang tamu, serta fasilitas penunjang lainnya yang dianggap penting bagi pejabat pemerintah. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa Pasanggrahan memiliki fungsi praktis dalam membantu mobilitas administrasi kolonial. Bangunan ini dapat dianggap sebagai salah satu fasilitas yang dapat membantu pejabat pemerintah kolonial melakukan kunjungan kerja atau mengawasi wilayah di Mandailing, seperti kedatangan gubernur jenderal dan rombongannya.

Seperti yang ada pada koran lama bahwa telah datang Gubernur Jenderal dan rombongannya tiba di perbatasan antara Pantai Barat Sumatera dan Tapanoeli siang jam 12.00 WIB, di mana mereka disambut oleh Residen Tapanoeli. Di Pasanggrahan di Kotanopan. Gubernur Jenderal disambut secara adat dan diarak oleh anak-anak sekolah sampai depan pasanggrahan. Pada sore hari, Gubernur Jenderal menerima para kepala suku dan pejabat setempat. Gubernur Jenderal dan rombongannya

bermalam di wisma tamu, yang telah dilengkapi secara khusus untuk acara tersebut, sementara penerangan listrik juga telah dipasang <sup>14</sup>

Bangunan pasanggrahan tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga memiliki fungsi simbolis dalam sistem pemerintahan kolonial. Adanya bangunan pemerintahan di suatu wilayah dapat dianggap sebagai representasi kekuasaan pemerintah kolonial di wilayah tersebut. Arsitektur kolonial yang digunakan pada bangunan pemerintahan sering memperlihatkan perbedaan yang jelas dengan bangunan masyarakat lokal. Perbedaan ini tampak dari bentuk, tata ruang, penggunaan material, dan desain yang disesuaikan dengan iklim tropis. Gaya arsitektur ini berkembang dalam arsitektur Hindia Belanda dan menjadi identitas bangunan pemerintahan kolonial, seperti Pasanggrahan Kotanopan . Bangunan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai simbol kekuasaan yang berlaku pada saat itu <sup>15</sup>.

#### **b. Sebagai Fasilitas Administrasi Pemerintahan Militer Jepang**

Masa pendudukan Jepang hingga Revolusi Kemerdekaan Indonesia merupakan periode transformasi yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Setelah pemerintahan kolonial Belanda berpindah ke pemerintahan militer Jepang pada tahun 1942, banyak fasilitas dan gedung yang pernah digunakan pemerintah Hindia Belanda harus disesuaikan dengan fungsinya. Struktur pemerintahan dan struktur pendukung administrasi kolonial, seperti pasanggrahan, mengalami

<sup>14</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 412.

<sup>15</sup> Nugroho Notosusanto, *Pendudukan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Indonesia Tahun 1942-1945*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hal.65

perubahan juga. Saat ini, fungsi bangunan tidak lagi terbatas pada administrasi kolonial, kebutuhan militer, kondisi perang, dan dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai memengaruhinya.

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang lebih terpusat dan ketat. Untuk mendukung kepentingan militer Jepang, sejumlah fasilitas yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah Belanda dialihkan. Kebutuhan perang Asia Timur Raya dipenuhi dengan sarana transportasi, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum. Fungsi Pesanggrahan Kotanopan dipengaruhi oleh pergeseran pemerintahan dari Belanda ke Jepang. Pada masa kolonial Belanda, pesanggrahan itu terutama digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat administrasi, tetapi pada masa pemerintahan Jepang, fungsi tersebut dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pendudukan. Bangunan yang sebelumnya berfungsi sebagai fasilitas administratif dapat digunakan untuk mendukung operasi militer dan pemerintahan pendudukan Jepang<sup>16</sup>.

Perubahan struktur kekuasaan menyebabkan perubahan fungsi bangunan selama Revolusi Jepang. Kebijakan administratif yang berbeda diubah saat pemerintahan Jepang berpindah dari Belanda. Bangunan yang dulunya didirikan untuk mendukung birokrasi kolonial tidak lagi memenuhi fungsinya sepenuhnya. Pesanggrahan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat singgah pejabat kolonial dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih sesuai dengan keadaan saat itu, seperti tempat pertemuan, pusat

---

<sup>16</sup>Serafica Gischa, "Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia", 6 Februari 2020 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/134500469/sejarah-otonomi-daerah-di> (diakses 02 Juni 2026)

koordinasi, dan fasilitas sementara untuk kepentingan keamanan dan pemerintahan.

Masa pendudukan Jepang, Pasanggrahan Kotanopan digunakan untuk kebutuhan kantor atau pos administrasi pemerintahan militer, tempat persinggahan dalam perjalanan dinas militer dan pemerintahan juga sebagai pusat komunikasi serta pengumpulan informasi lokal fungsinya bergeser dari tempat peristirahatan pejabat kolonial dan pelancong menjadi bagian dari sistem administrasi, mobilitas, dan kontrol ruang Jepang. Perubahan tersebut sejalan dengan kebijakan Japanisasi yang menghapus simbol serta pengaruh Belanda dan mengadaptasi bangunan kolonial untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. Perubahan ini dapat dianggap sebagai adaptasi bangunan terhadap tuntutan sosial dan politik yang berubah dalam teori fungsionalisme struktur. Bangunan fisik dipertahankan, tetapi fungsi di dalamnya diubah. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu bangunan dipengaruhi oleh tujuan awalnya dan kebutuhan masyarakat dan penguasa. Oleh karena itu, Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang berubah sepanjang sejarah<sup>17</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat berubah karena perang selama pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan. Mobilitas penduduk meningkat, aktivitas pemerintahan berubah, dan beberapa area menjadi pusat kegiatan militer dan politik. Politik dan penggunaan ruang dipengaruhi oleh perang. Untuk keperluan perang, berbagai bangunan yang sebelumnya memiliki fungsi sipil sering kali diubah menjadi fasilitas

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 188

militer. Perubahan fungsi bangunan seperti ini banyak terjadi selama revolusi di Indonesia. Sumatra merupakan bagian penting dari perjuangan untuk kemerdekaan selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Karena ketidakpastian politik, pemerintahan dan aktivitas sosial berubah di berbagai tempat. Bangunan seperti Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap memiliki posisi penting dalam situasi seperti itu karena keberadaannya<sup>18</sup> memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat singgah atau tempat pertemuan bagi tokoh pemerintahan atau tokoh perjuangan.

## **2. Pasanggrahan Masa Revolusi sampai Orde Lama (1945–1965)**

### **a. Sebagai Tempat Pertemuan dan Pendukung Perjuangan**

Berita tentang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945 tidak segera sampai ke wilayah pedalaman Tapanuli Selatan. Kondisi ini disebabkan oleh ketatnya sensor yang diberlakukan tentara pendudukan Jepang, khususnya Rikugun, serta terganggunya berbagai sarana komunikasi. Akibatnya, informasi mengenai Proklamasi menyebar secara bertahap melalui jaringan komunikasi yang masih berfungsi dan hubungan antardaerah. Di Kotanopan, berita tersebut baru diketahui dan dikonfirmasi secara luas pada akhir Agustus 1945 melalui jaringan telegraf PTT, singkatan dari Post, *Telegraaf en Telefoon*, serta melalui para pemuda yang membawa kabar secara lisan dari Bukittinggi, Padang, dan Medan<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hal. 36.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Sumatera Utara* (Medan: Depdikbud Sumatra Utara, 1978), hal. 105–108

Masa awal Orde Lama, kedatangan berita kemerdekaan mendorong terbentuknya konsolidasi spontan di kalangan elite terpelajar, ulama, serta para pemimpin adat atau raja-raja kuria. Kotanopan, yang secara historis dikenal sebagai salah satu basis pergerakan kebangsaan di Tapanuli Selatan dan tempat lahirnya tokoh-tokoh nasional seperti Mr. Sutan Takdir Alisjahbana dan Willem Iskander, segera berkembang menjadi pusat mobilisasi masyarakat. Di wilayah ini, berbagai kelompok tersebut berperan dalam menyebarkan berita kemerdekaan, membangun dukungan terhadap Republik Indonesia, dan mengorganisasi gerakan politik serta sosial untuk mempertahankan kemerdekaan<sup>20</sup>.

Salah satu aksi penting dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Kotanopan adalah pengambilalihan kompleks Pasanggrahan Kotanopan. Pada awal September 1945, sekelompok pemuda pergerakan yang dipimpin oleh tokoh lokal, seperti H. Ayyub Sulaiman Lubis, bersama mantan pemimpin laskar, mendatangi kompleks tersebut untuk mengakhiri pengawasan sisa-sisa kekuasaan Jepang dan mengambil alih bangunannya. Penguasaan itu ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di tiang utama yang berada di halaman depan Pesanggrahan Kotanopan. Peristiwa ini memiliki makna yang penting karena menegaskan berakhirnya kekuasaan hukum serta administrasi Jepang dan Hindia Belanda di Mandailing Julu, sekaligus mengubah status Pasanggrahan Kotanopan dari *government rusthuis*, yaitu rumah peristirahatan milik

---

<sup>20</sup> Willer, *Het landschap Mandelhing voor zoo ver het onder rechtstreeksch beheer van het Gouvernement staat* (Batavia: Lange & Co., 1861), hal. 90–94

pemerintah kolonial, menjadi aset yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia<sup>21</sup>.

Pasanggrahan Kotanopan secara resmi difungsikan sebagai Sekretariat Komite Nasional Indonesia Daerah Kotanopan setelah pengambilan Alihan oleh Masyarakat Kotanopan. Aula utama dan kamar-kamar berukuran besar di bangunan tersebut digunakan sebagai kantor administrasi sementara sekaligus tempat berlangsungnya berbagai rapat intensif. Dalam kurun 1945–1947, Pasanggrahan menjadi pusat konsolidasi politik dan pemerintahan di tingkat lokal, terutama untuk menyelenggarakan musyawarah pemerintahan sipil. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, para pemimpin setempat membahas pembentukan struktur kewedanaan, penunjukan kepala daerah sipil Republik, pengaturan administrasi pemerintahan, serta pemeliharaan ketertiban umum di seluruh desa di wilayah Mandailing Julu<sup>22</sup>.

Pasanggrahan Kotanopan juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan pengalihan ikatan dinas dan pengambilan sumpah bagi para pegawai birokrasi yang sebelumnya bekerja di bawah pemerintahan kolonial atau pendudukan Jepang. Dalam prosesi tersebut, para pamong praja menyatakan kesetiaan dan komitmen untuk mengabdikan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasanggrahan berfungsi sebagai ruang pertemuan yang netral bagi ulama, termasuk para pimpinan pesantren, dan para pemimpin adat atau raja-raja kuria. Pertemuan antara kedua unsur penting masyarakat ini

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 112

<sup>22</sup> Idfitriyani, "Adaptasi Fungsi Bangunan Kolonial sebagai Upaya Pelestarian Warisan Arsitektur di Tapanuli Selatan," *Jurnal Permukiman dan Warisan Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2014), hal. 46

membantu menyatukan pandangan dalam menghadapi perubahan politik, menjaga ketertiban, serta mencegah perpecahan sosial dan konflik internal di Mandailing<sup>23</sup>.

Tahun 1948 merupakan salah satu periode paling kritis dalam sejarah pertahanan Republik Indonesia. Penandatanganan Perjanjian *Renville* pada Januari 1948 menimbulkan kerugian teritorial yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Melalui penerapan Garis *Demarkasi Van Mook*, Belanda mempersempit wilayah kekuasaan Republik, sekaligus memberlakukan blokade ekonomi dan militer secara ketat. Kebijakan tersebut mengakibatkan wilayah Republik di Jawa dan Sumatra semakin terisolasi serta mengalami keterbatasan dalam mobilitas, distribusi logistik, dan komunikasi<sup>24</sup>.

Situasi politik dan militer yang penuh tekanan, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukannya konsolidasi nasional. Upaya ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perlawanan rakyat di berbagai daerah, memperkuat persatuan nasional, serta menghimpun dukungan finansial melalui penerbitan obligasi. Dana tersebut diperlukan untuk membiayai kegiatan diplomasi dan mempertahankan kekuatan militer, termasuk rencana pembelian pesawat terbang yang diharapkan dapat membantu menembus blokade udara Belanda<sup>25</sup>.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, memutuskan untuk melaksanakan safari politik ke sejumlah kota strategis di Pulau Sumatra. Perjalanan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kunjungan politik, tetapi

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,41-42

<sup>24</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 448

<sup>25</sup> *Ibid.*,450

juga sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan moral perjuangan rakyat, serta menggalang dukungan politik dan material bagi keberlangsungan perjuangan Republik Indonesia.

Rangkaian kunjungan kepresidenan di wilayah Tapanuli, Presiden Soekarno menempuh perjalanan darat dari Bukittinggi menuju Padangsidempuan dan Prapat. Pada 16 Juni 1948, Bung Karno bersama rombongannya tiba di Kotanopan. Pemerintah daerah bersama pimpinan Komite Nasional Indonesia di Kotanopan menetapkan Pasanggrahan Kotanopan sebagai pusat kegiatan protokoler kepresidenan sekaligus tempat menginap resmi Presiden Soekarno. Kedatangan Presiden Soekarno disambut dengan antusias oleh ribuan masyarakat. Selain warga setempat, penyambutan tersebut juga dihadiri oleh anggota laskar perjuangan, para ulama, serta tokoh-tokoh adat. Mereka memadati jalan utama dan halaman kompleks pasanggrahan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Puncak kunjungan bersejarah ini ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Akbar di halaman depan Pasanggrahan Kotanopan. Karena tidak tersedia panggung formal yang cukup besar untuk menampung jumlah massa yang hadir, Presiden Soekarno menggunakan tangga batu pada bagian depan Pasanggrahan Kotanopan sebagai tempat untuk menyampaikan pidatonya. Dari atas tangga, Presiden Soekarno menyampaikan pidato

---

<sup>26</sup> Ahmad Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 7: Periode Renville* (Bandung: Angkasa, 1978), hal. 180–185.

kebangsaan dengan gaya orasi yang khas, tegas, dan penuh semangat. Dalam pidatonya memuat beberapa pesan strategis sebagai berikut:

1). Peneguhan Kedaulatan Negara

Presiden Soekarno mengimbau seluruh masyarakat Mandailing agar tidak terpengaruh oleh politik adu domba atau *divide et impera* yang dijalankan Belanda. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tetap setia mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2). Penggalangan Dana untuk Perjuangan

Presiden Soekarno mengajak masyarakat Kotanopan, termasuk para dermawan setempat, untuk memberikan dukungan material bagi perjuangan Republik. Dukungan tersebut dapat berupa harta benda, perhiasan emas, maupun uang tunai. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung penerbitan Obligasi Nasional 1948 dan pembelian pesawat terbang bagi Republik Indonesia, termasuk pesawat C-47 Dakota yang kemudian dikenal sebagai Seulawah.

3). Penguatan Persatuan antara Ulama dan Pemangku Adat

Presiden Soekarno menyerukan agar para ulama dan pemangku adat di Mandailing terus memperkuat kerja sama. Sinergi antara keduanya dipandang penting untuk menjaga persatuan masyarakat, membangun dukungan rakyat, serta memperkuat pertahanan di wilayah belakang selama berlangsungnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Askolani Nasution, *Kisah di Balik Tugu Perintis Kotanopan* (Panyabungan: Terbitan Mandailing Online, 2017), hal. 10–14



**Gambar 3.3 :** Penyampaian Pidato oleh Soekarno Ditangga Teras Pasanggrahan 16 juni 1948  
( Sumber

:<https://kotanopankotasejarah.blogspot.com/2015/06/kotanopankotasejarah.com.html> )

Presiden Soekarno menempati Kamar Nomor 1, yaitu kamar utama yang terletak di bagian depan bangunan. Sejak 16 Juni 1948 hingga masa kini, Kamar Nomor 1 secara konsisten dikenal oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai “Kamar Soekarno”. Penyebutan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda lokasi atau identitas fisik ruangan, tetapi juga mengandung makna simbolis. Kamar itu dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah, karena menjadi tempat Presiden Soekarno beristirahat ketika Kotanopan berperan sebagai salah satu wilayah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Dinamika revolusi di Pasanggrahan Kotanopan kian memuncak saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan nasional ditawan, Tentara Nasional Indonesia di bawah komando Panglima Besar Soedirman. Memproklamasikan berlakunya Pemerintahan Darurat

---

<sup>28</sup> Ahmad Nasution, *op.cit.*, hal.188

Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra dan menggelar Perang Gerilya Semesta .

Peta militer Sumatra bagian tengah, Kotanopan memiliki peran penting karena berada di jalur utama yang menghubungkan Karesidenan Tapanuli dengan wilayah Sumatra Barat, yang menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pasanggrahan Kotanopan kemudian dialih fungsikan menjadi Pos Transit Pertahanan Darurat dan Sub-Markas Gerilya TNI Divisi X/Sumatera bersama Tentara Pelajar dan laskar-laskar rakyat setempat. Ruang-ruang kamar di pasanggrahan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pasokan bahan makanan, amunisi, serta pos medis darurat untuk merawat prajurit TNI dan pejuang gerilya yang terluka dalam kontak senjata di koridor perbukitan Mandailing Julu<sup>29</sup>.

#### **b. Sebagai Tempat Kegiatan Pemerintahan**

Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir Desember 1949 dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950, tatanan politik Indonesia memasuki era Demokrasi Parlementer. Pada periode ini, fungsi dari Pasanggrahan Kotanopan secara bertahap dikembalikan kepada fungsi administrasi sipil dan pelayanan publik. Pada pemerintahan daerah tahun 1950-an, Kotanopan berkedudukan sebagai ibu kota Kewedanaan Kotanopan di bawah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tata kelola Pasanggrahan Kotanopan berada di bawah kewenangan Sekretariat

---

<sup>29</sup> Simatupang , *Laporan dari Banaran: Pengalaman dalam Perang Gerilya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980), hal. 310

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagian Umum Kantor Camat/Wedana Kotanopan<sup>30</sup>.

Akhir dekade 1950-an, hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatra dan Sulawesi mengalami krisis hebat akibat ketidak puasan terhadap perimbangan keuangan dan dominasi politik pusat. Krisis Tiga Daerah dan puncaknya Deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Bukittinggi menyeret kawasan Tapanuli Selatan dan Mandailing ke dalam pusaran konflik bersenjata.

Kotanopan yang berada di koridor perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadikan kota ini sebagai salah satu zona pertempuran dan perlintasan dalam Operasi yang dilancarkan oleh Angkatan Darat (TNI) di bawah komando Mayor Jenderal Ahmad Yani untuk menumpas kekuatan PRRI. Kompleks pesanggrahan kembali diambil alih sementara oleh unit militer TNI-AD (Kodam I/ Bukit Barisan) untuk dijadikan pos komando taktis penertiban keamanan wilayah<sup>31</sup>.

Pencetusan Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Pada periode ini, dinamika politik nasional sangat didominasi oleh retorika revolusi, sosialisasi Nasionalis, Agama, Komunis, serta pembentukan jaringan Front Nasional hingga ke tingkat kecamatan. Di Kotanopan, Pesanggrahan Kotanopan kembali

---

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Keppres dan Peraturan Pemerintah Tahun 1961* (Jakarta: Sekneg RI, 1961)

<sup>31</sup> Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), hal. 178

memegang peranan penting dalam panggung politik lokal<sup>32</sup>. Sebagai tempat penyelenggaraan rapat-rapat umum, serta perayaan agenda-agenda nasional seperti memperingati hari Kemerdekaan, Hari Lahirnya Pancasila. Bangunan ini menjadi arena di mana jargon-jargon politik Pemimpin Besar Revolusi disampaikan kepada masyarakat Mandailing.

Hingga berakhirnya era Orde Lama pada kurun waktu 1965-1966, kondisi fisik Pasanggrahan Kotanopan secara umum masih mempertahankan bentuk asli arsitektur kolonialnya. Struktur utama bangunan yang menggunakan material kayu jati dan meranti pilihan, dinding tembok tebal berplaster kapur, serta atap seng gelombang masih berdiri kokoh.<sup>33</sup>

### **3. Pasanggrahan pada Masa Orde Baru (1966–1998)**

#### **a. Sebagai Wisma Pemerintahan Sumatera Utara**

Awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Akibatnya, fungsi bangunan kolonial tersebut diubah. Sementara kebutuhan akan administrasi pemerintah semakin meningkat, pembangunan fasilitas baru membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan bangunan yang telah ada untuk membantu pemerintah daerah dan pusat menjalankan tugas mereka, termasuk fungsi Pasanggrahan Kotanopan. Dari tahun 1950-an hingga 1980-an, pengelolaan Pasanggrahan secara resmi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi aset

<sup>32</sup> Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 192.

<sup>33</sup> Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Inventarisasi Aset Daerah dan Bangunan Pemerintah* (Padangsidempuan: Setda Tapsel, 1965), hal. 18

wisma negara yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan provinsi tersebut. Untuk tetap sesuai dengan standar modern, lantai interior dan fasilitas sanitasi mengalami renovasi kecil tanpa mengubah elemen arsitektur kolonial seperti dinding kayu dan verandas<sup>34</sup>.

Wisma merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat menginap sementara. Istilah ini biasanya digunakan untuk tempat tinggal yang sifatnya tidak permanen, baik untuk pegawai, tamu, maupun orang yang sedang melakukan kegiatan tertentu. Pemerintah Indonesia secara bertahap mengubah struktur administrasi negara selama masa Orde Baru. Berbagai fasilitas yang dapat membantu pemerintah harus ada. Wisma pemerintah atau rumah penginapan resmi bagi pejabat negara yang melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu salah satu fasilitas yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Wisma pemerintah digunakan sebagai tempat pejabat pemerintah pusat dan daerah beristirahat saat melakukan tugas kedinasan. Tujuan dari keberadaan fasilitas ini adalah untuk membuat pekerjaan pemerintah lebih mudah, terutama di daerah yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai.

---

<sup>34</sup> *Statistik Daerah Kecamatan Kotanopan 2013* ( Mandailing natal : Bidang Integrasi pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2013 ) hal 04



**Gambar 3.4 :** Suasana Pasanggrahan Pada tahun 1971  
( Sumber : <https://jurnaltabagsel.blogspot.com/> )

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan menjadi wisma pemerintah dapat dipahami sebagai upaya bangunan untuk memenuhi kebutuhan administrasi negara setelah kemerdekaan. Bangunan yang dulunya digunakan untuk mendukung sistem kolonial diubah fungsinya agar tetap dapat digunakan dalam sistem pemerintahan baru. Dalam teori fungsionalisme struktur, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi suatu struktur agar tetap memiliki fungsi dalam sistem sosial yang baru. Perubahan fungsi semacam ini menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu bangunan sering kali ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan sosial dan politik<sup>35</sup>.

#### **b. Sebagai Simbol Otoritas Daerah**

Bangunan pemerintahan mempunyai dua fungsi yaitu praktis dan simbolis. Pasanggrahan menjadi simbol kehadiran pemerintah Belanda di daerah selama era kolonial. Makna simbolik ini berkembang

---

<sup>35</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2021. *Tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (di akses melalui sumut.antarnwes 27 agustus 2026)

setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Bangunan yang dulunya menunjukkan kekuasaan kolonial sekarang dapat berfungsi sebagai representasi otoritas pemerintah Indonesia di tingkat daerah. Perubahan makna simbolik Pasanggrahan Kotanopan menunjukkan bahwa nilai historis bangunan berubah.

Perubahan fungsi simbolis ini menunjukkan bahwa bangunan memiliki nilai fisik dan nilai sosial, politik, dan historis yang berubah seiring berjalannya waktu. Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat juga memengaruhi perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan. Kebutuhan akan ruang publik dan fasilitas umum meningkat seiring perkembangan pemerintahan Indonesia dan aktivitas masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Pasanggrahan Kotanopan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat pertemuan masyarakat, kegiatan administratif lokal, dan fungsi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal.

Tahun 1950-an hingga 1970-an, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa renovasi ringan pada bagian interior Pasanggrahan Kotanopan. Renovasi tersebut meliputi penggantian lantai keramik lama yang telah mengalami kerusakan dengan material lantai yang lebih modern untuk meningkatkan kenyamanan sebagai wisma penginapan, serta perbaikan pada bagian pipa sanitasi. Meskipun dilakukan beberapa perbaikan, tata letak ruangan tetap dipertahankan sehingga tidak mengubah bentuk utama bangunan.

Perubahan pada bagian luar bangunan terlihat dengan dibangunnya Tugu Perintis Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1988 di halaman depan Pasanggrahan Kotanopan. Tugu tersebut berbentuk obelisk dan memuat informasi mengenai Proklamasi 1945, Pembukaan UUD 1945, serta nama-nama tokoh atau pahlawan dari Mandailing. Pembangunan tugu tersebut menambah nilai simbolis pada kawasan Pasanggrahan Kotanopan, tetapi tidak mengubah bentuk dan struktur utama bangunan.<sup>36</sup>



**Gambar 3.5 :** Tugu Perintis Didepan Pasanggrahan Yang Setiap Sisi Berisi Teks Proklamasi dan Daftar nama pahlawan asal Kotanopan ( Sumber : Dokumentasi Pribadi )

#### **4. Pasanggrahan Pada Era Reformasi (1999–2013)**

##### **a. Pasanggrahan sebagai Penginapan Umum**

Era Reformasi memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah cara pemerintahan beroperasi, tetapi juga bagaimana aset pemerintah daerah dikelola, termasuk bangunan bersejarah. Kebijakan ini memberikan

<sup>36</sup> Rahmat Kurnia Lubis “Kotanopan: Desa Tua, Bertuah dan Bersejarah di Mandailing Natal,” rentak.idSenin, 10 Februari 2025 <https://rentak.id/kotanopan-desa-tua-bertuah-dan-bersejarah-di-mandailing-natal/> (akses 11 mei 2026)

pemerintah daerah peluang untuk memutuskan bagaimana memanfaatkan aset bersejarah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasca penyerahan kedaulatan dan penataan administrasi pemerintahan daerah, kompleks Pasanggrahan Kotanopan diintegrasikan ke dalam skema inventarisasi aset pemerintah daerah, baik pada masa Kabupaten Tapanuli Selatan hingga era pemekaran Kabupaten Mandailing Natal tahun 1999. Tanggung jawab operasional berada di bawah kewenangan Sekretariat Daerah khususnya Bagian Umum/Aset serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lokal. Tanggung jawab operasional dan yuridis berada di bawah kewenangan Sekretariat Daerah khususnya Bagian Umum/Aset serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan, dan pengaturan pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas umum, termasuk bangunan bersejarah seperti Pasanggrahan Kotanopan<sup>37</sup>.

Noni Priyaeni selaku kepala pengurus Pasanggrahan Kotanopan menjelaskan bahwa, sebagai bangunan tua yang menggunakan material kayu dan memiliki ciri khas arsitektur kolonial, Pasanggrahan Kotanopan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan struktur akibat usia bangunan dan kondisi lingkungan yang lembap. Upaya tersebut meliputi penggantian dan perawatan papan lantai kayu yang lapuk, perbaikan saluran pembuangan air dan fasilitas sanitasi, serta perawatan interior kamar,

---

<sup>37</sup> Awi Ruben dkk, "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintahan Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis" *Collegium Studiosum Journal*, VOL. 7 NO. 1 (2024)

pencahayaannya, dan perabot tanpa mengubah tata ruang asli. Selain itu, atap dan dinding yang dirawat secara rutin, termasuk melalui pengecatan ulang fasad, untuk melindungi struktur kayu dari pelapukan dan pengaruh cuaca. Secara keseluruhan, pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, kenyamanan, dan keaslian arsitektur Pesanggrahan Kotanopan<sup>38</sup>.

Pasanggrahan masih berada dalam pengelolaan pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hingga saat ini. Tetap difungsikan sebagai akomodasi bagi tamu pemerintah atau masyarakat umum. Kegiatan tertentu, digunakan untuk acara resmi, rapat, atau kegiatan sosial-budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pelestarian keberadaan bangunan yang mana pemerintah daerah berupaya mempertahankan eksistensi Pasanggrahan sebagai bagian dari warisan sejarah dan aset daerah. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melihat Pasanggrahan dari sisi fungsional, tetapi juga dari sisi pelestarian nilai sejarah dan budaya<sup>39</sup>.

Bangunan yang memiliki nilai historis tinggi, pelestarian Pesanggrahan Pasanggrahan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertahankan fungsi bangunan sebagai tempat akomodasi dan kegiatan publik, menjaga keaslian arsitektur serta elemen-elemen khasnya, dan melestarikan nilai

---

<sup>38</sup> Noni Priyaeni, kepala pengurus Pasanggrahan Kotanopan, wawancara langsung, 06 april 2026

<sup>39</sup> Bappeda Kabupaten Mandailing Natal, *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aset Bangunan Bersejarah Daerah* (Panyabungan: Bappeda Madina, 2011), hal. 24.

sejarahnya sebagai saksi berbagai peristiwa penting, termasuk kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1948. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga warisan budaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Sebelum era reformasi, Pasanggrahan Kotanopan secara historis difungsikan sebagai tempat persinggahan resmi bagi pejabat pemerintah, tamu dinas, dan rombongan resmi yang melakukan perjalanan antar wilayah. Fungsi ini merupakan warisan dari masa kolonial, ketika Pasanggrahan dibangun sebagai bagian dari sistem akomodasi pemerintah untuk mendukung mobilitas administratif dan logistik di wilayah Mandailing. Pada masa itu, Pasanggrahan tidak terbuka untuk umum. Akses terhadap fasilitas ini terbatas pada kalangan tertentu, terutama pejabat pemerintah dan tamu yang memiliki surat tugas atau izin resmi dari pengelola. Fungsi utamanya pada saat itu sebagai tempat istirahat sementara dalam rangka perjalanan dinas, bukan sebagai akomodasi komersial atau pariwisata<sup>40</sup>.

Pasca pemekaran Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 1999 yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, orientasi tata kelola aset daerah mengalami pergeseran paradigma<sup>41</sup>. Pada rentang tahun 1999-2013, seiring dengan meningkatnya dinamika mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian, dan potensi pariwisata di kawasan Mandailing Julu, pemerintah daerah mulai melonggarkan rigiditas

<sup>40</sup> Basyral Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hal. 142

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1998)

penggunaan Pasanggrahan Kotanopan. Bangunan bersejarah ini memasuki fase transisi penting, di mana pemanfaatannya berkembang dari sekadar tempat persinggahan pejabat kedinasan menjadi fasilitas publik yang lebih inklusif<sup>42</sup>.

Perubahan paling mendasar dalam fungsi Pasanggrahan adalah keterbukaannya terhadap publik. Pasanggrahan Kotanopan tidak lagi khusus untuk agenda pemerintahan, melainkan resmi dibuka sebagai sarana penginapan umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, wisatawan lokal, peneliti, maupun pelaku perjalanan lintas Sumatra. Pelonggaran fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna aset daerah agar tidak terbengkalai sekaligus memberikan alternatif sarana akomodasi di Kecamatan Kotanopan.

Samsul Bakhri menjelaskan selaku salah satu staf pengurus pasanggrahan menyatakan bahwa, keterbukaan ini ditandai dengan adanya sistem pembayaran atau tarif yang dikenakan kepada pengguna.

Keterbukaan ini ditandai dengan adanya sistem pembayaran atau tarif yang dikenakan kepada pengguna. Besaran tarif yang ditetapkan berada pada kategori terjangkau dengan mekanisme pembayaran yang dikelola sebagai kontribusi pendukung operasional kebersihan dan pemeliharaan rutin bangunan. Dengan tarif sebesar Rp 200.000 per orang per hari. Penerapan tarif ini menunjukkan bahwa Pasanggrahan telah bertransformasi dari fasilitas eksklusif pemerintah menjadi akomodasi semi komersial yang dikelola secara profesional. Transformasi ini mengubah citra Pasanggrahan Kotanopan di mata masyarakat, dari yang

---

<sup>42</sup> Bappeda Kabupaten Mandailing Natal, *Op.cit.*, hal. 29.

semula terkesan formal dan tertutup menjadi sebuah penginapan publik yang ramah, namun tetap mempertahankan aura historis kolonialnya.<sup>43</sup>

Samsul Bakhri lanjut menjelaskan, bahwa Pasanggrahan Kotanopan memiliki kapasitas yang cukup dengan menyediakan 11 kamar tidur. Pasanggrahan yang letaknya di lembah yang dikelilingi pegunungan membuat udara di Kotanopan relatif sejuk. Sirkulasi udara cukup mengandalkan jendela-jendela kayu besar yang menjadi ciri khas arsitektur kolonial. Kamar mandi dan sanitasi yang cukup untuk menampung kapasitas penginapan. Area teras dan ruang bersama untuk aktivitas sosial. Meskipun tidak dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti hotel modern, Pasanggrahan menawarkan pengalaman akomodasi yang autentik dengan nilai sejarah yang kuat.

Elemen paling signifikan dalam tata ruang interior bangunan ini adalah keberadaan Kamar Nomor 1, yang secara historis dikenal sebagai Kamar Soekarno. Kamar ini merupakan ruang tempat Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, menginap ketika melakukan kunjungan kerja pada Rapat Akbar tanggal 16 Juni 1948 di Kotanopan. Tidak membedakan harga tarif maupun interior dalam kamarnya dengan kamar lainnya. Sementara itu, kondisi fisik kamar-kamar lainnya menunjukkan keberlangsungan perawatan yang aktif. Adanya perawatan berkala seperti pembenahan pada tiga unit kamar yang sedang diperbaiki secara bergantian-menjadi bukti logis bahwa tata kelola operasional

---

<sup>43</sup>Samsul Bakhri, Salah satu staf pengurus Pasanggrahan Kotanopan, wawancara langsung, 08 april 2026

penginapan berjalan secara dinamis dan responsif terhadap kenyamanan pengunjung<sup>44</sup>.



**Gambar 3.6 :** Halaman Depan Pasanggrahan  
( Sumber : Dokumentasi Pribadi )



**Gambar 3.7 :** Tampak Luar Kamar dengan  
Pintu Khas Arsitektur Kolonial Belanda  
( Sumber : Dokumentasi Pribadi )



**Gambar 3.8 :** Ruang Tamu tempat menerima  
Yang Ingin Menginap di Pasanggrahan  
( Sumber : Dokumentasi Pribadi )



**Gambar 3.9 :** Keadaan Dalam Kamar  
Penginap Pasanggrahan  
( Sumber : Dokumentasi Pribadi )

Salah satu bukti konkret bahwa Pasanggrahan mulai dibuka sebagai untuk penginapan umum pada tahun 2013. Pada September 2013, dimulai dengan kedatangan rombongan peserta JSSP yang dari berbagai daerah, tim medis, serta media massa nasional resmi singgah dan memanfaatkan fasilitas Pasanggrahan Kotanopan sebagai tempat bermalam. Kegiatan yang melintasi ribuan kilometer di Pulau Sumatra yang merupakan ajang olahraga berskala nasional tersebut menempatkan Kotanopan sebagai salah satu titik pelintasan yang

<sup>44</sup> *Ibid*

krusial. Peserta JSSP menunjukkan bahwa fungsi fasilitas pasanggrahan masih aktif sebagai tempat penginapan yang dapat diakses oleh publik, bukan hanya tamu dinas. Pasanggrahan juga mampu menampung rombongan besar, sehingga menunjukkan bahwa bangunan ini layak digunakan. Selain itu, nilai sejarahnya tetap dipertahankan melalui penyewaan Kamar Soekarno kepada masyarakat umum, termasuk peserta JSSP, yang membuktikan bahwa nilai historis bangunan tetap diperhatikan dalam pengelolaan modern<sup>45</sup>.

Zulkarnain Lubis yang merupakan Lurah di Kelurahan Kotanopan di tahun 2013 menyampaikan perubahan pasanggrahan dipahami sebagai perluasan fungsi, dimana fungsi lama tidak hilang sepenuhnya, tetapi diperluas untuk mencakup pemanfaatan yang lebih inklusif. Dari masa kolonial hingga awal kemerdekaan, Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi pejabat pemerintah dan tamu dinas. Namun, pada periode 1999–2013, fungsi Pasanggrahan mengalami perluasan karena mulai dibuka untuk masyarakat umum dan wisatawan. Perluasan ini didorong oleh tuntutan efisiensi anggaran, yaitu kebutuhan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan dari aset yang dimiliki melalui penerapan tarif komersial<sup>46</sup>.

Zulkarnain Lubis juga menjelaskan bahwa nilai sejarah dan arsitektur Pasanggrahan yang menarik turut mendukung

---

<sup>45</sup> Tim Tim Jelajah Sepeda Kompas, *Laporan Perjalanan Jelajah Sepeda Sabang-Padang 2013* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)

<sup>46</sup>Zulkarnainin Lubis, kepala Kelurahan Kotanopan pada tahun 2013, wawancara langsung, 12 april 2026

pengembangannya sebagai daya tarik wisata akomodasi yang unik. Di sisi lain, keterbatasan jumlah hotel atau penginapan komersial di wilayah Kotanopan menjadikan Pasanggrahan sebagai alternatif akomodasi yang penting bagi wisatawan dan pelancong. Hingga tahun 2013, Pasanggrahan masih menjalankan dualisme fungsi yaitu perubahan fungsi Pasanggrahan tidak bersifat linier atau menggantikan fungsi lama, melainkan bersifat kumulatif. Fungsi lama sebagai tempat persinggahan resmi tetap dipertahankan, sementara fungsi baru sebagai penginapan umum ditambahkan untuk memperluas manfaat sosial dan ekonomi dari aset daerah.

**b. Pasanggrahan sebagai Warisan Sejarah dan Identitas Lokal**

Pasanggrahan Kotanopan merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Kotanopan dan Mandailing Natal. Dibangun pada tahun 1930, keberadaan Pasanggrahan tidak hanya berkaitan dengan fungsi akomodasi bagi pejabat kolonial, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kotanopan hingga masa kemerdekaan. Nilai historis bangunan ini semakin kuat karena berkaitan dengan berbagai peristiwa perjuangan dan perkembangan masyarakat di wilayah Mandailing<sup>47</sup>.

Salah satu peristiwa yang memperkuat nilai sejarah Pasanggrahan Kotanopan adalah kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948. Dalam kunjungan tersebut, Soekarno bermalam di Pasanggrahan dan menyampaikan pidato dalam sebuah rapat akbar yang

---

<sup>47</sup>Yoseph Pencawan, "Merestorasi Jejak Bung Karno di Sumatra Utara" <https://mediaindonesia.com/nusantara/467487/merestorasi-jejak-bung-karno-di-sumatra-utara> (di akses Kamis 13 Agustus 2016)

dihadiri masyarakat dan tokoh-tokoh perjuangan setempat. Peristiwa yang menjadikan Pasanggrahan tidak hanya sebagai peninggalan masa kolonial, tetapi juga sebagai salah satu tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan di Kotanopan

Nilai sejarah Pasanggrahan semakin diperkuat dengan keberadaan Tugu Perintis Kemerdekaan yang dibangun di kawasan Pasanggrahan. Tugu tersebut menjadi bagian dari penanda sejarah perjuangan masyarakat Kotanopan dan memperkuat hubungan antara Pasanggrahan dengan memori perjuangan kemerdekaan di daerah tersebut. Keberadaan bangunan dan tugu dalam satu kawasan menjadikan Pasanggrahan tidak hanya memiliki nilai arsitektural, tetapi juga nilai sejarah dan simbolis<sup>48</sup>.

Masyarakat sebagai tetangga dan tokoh agaman di kelurahan Kotanopan dan Mandailing Natal, opung Amri Mukhlis Daulay menyatakan Pasanggrahan kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas sejarah lokal. Bangunan ini yang menjadi penghubung antara masyarakat masa kini dengan berbagai peristiwa sejarah yang pernah berlangsung di wilayah kotanopan. Oleh karena itu, pelestarian Pasanggrahan penting dilakukan tidak hanya untuk mempertahankan bangunan sebagai peninggalan fisik, tetapi juga untuk menjaga nilai sejarah dan memori kolektif masyarakat terhadap perjuangan serta perkembangan sejarah Kotanopan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, *Laporan Inventarisasi Situs Sejarah dan Cagar Budaya Mandailing Natal* (Panyabungan: Disbudpar Madina, 2015), hal. 38.

<sup>49</sup> wawancara dengan Opung Amri Mukhlis Daulay, Tokoh Agama Kelurahan Kotanopan , Di Kotanopan, 14 april 2026

### C. Faktor yang Mempengaruhi

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sejak 1930 hingga 2013 dipengaruhi oleh kondisi bangunan serta perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari pemanfaatannya sebagai tempat persinggahan dan fasilitas pemerintahan pada masa kolonial, kemudian mengalami penyesuaian fungsi pada masa setelah kemerdekaan hingga akhirnya digunakan sebagai penginapan bagi masyarakat umum

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan kondisi fisik, tata ruang, dan lokasi Pasanggrahan Kotanopan. Kondisi bangunan yang bertahan serta tata ruang yang dapat disesuaikan memungkinkan Pasanggrahan digunakan untuk berbagai kebutuhan pada periode yang berbeda. Keberadaan ruang kamar, ruang tamu, dan beranda mendukung pemanfaatan bangunan sebagai tempat persinggahan umum maupun kegiatan pemerintahan<sup>50</sup>.

Selain itu, lokasi Pasanggrahan yang berada di kawasan Kotanopan turut mendukung keberlanjutan pemanfaatannya. Letaknya yang mudah dijangkau menjadikan bangunan tersebut tetap memiliki fungsi bagi pejabat pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, kondisi fisik bangunan, tata ruang, dan lokasi menjadi faktor internal yang mendukung keberlangsungan serta perubahan fungsi Pasanggrahan dari waktu ke waktu<sup>51</sup>.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan perubahan politik, pemerintahan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pergantian kekuasaan dari masa

---

<sup>50</sup> Handinoto, *lok. cit.*, 82

<sup>51</sup> Nuraini, *Op.cit.*, hal 14

kolonial, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga masa Orde Baru dan otonomi daerah menyebabkan pemanfaatan Pasanggrahan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap periode<sup>52</sup>.

Perubahan kebutuhan masyarakat juga turut memengaruhi fungsi Pasanggrahan. Perkembangan mobilitas masyarakat dan kegiatan pemerintahan serta terbatasnya fasilitas penginapan di wilayah Kotanopan mendorong pemanfaatan bangunan sebagai tempat menginap bagi masyarakat umum. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Pasanggrahan tidak bersifat tetap, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintah<sup>53</sup>.

Pada masa otonomi daerah, perubahan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan aset daerah turut memengaruhi pemanfaatan Pasanggrahan. Bangunan yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintahan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penginapan dan kegiatan pariwisata. Perubahan kebijakan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor eksternal yang mendorong perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 2013<sup>54</sup>.

### 3. Perubahan Makna Bangunan

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan tidak hanya menunjukkan perubahan dalam pemanfaatan bangunan, tetapi juga perubahan maknanya. Pada masa kolonial, Pasanggrahan berkaitan dengan keberadaan pemerintahan kolonial dan digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat. Setelah Indonesia merdeka, makna tersebut mengalami perubahan seiring dengan berbagai

---

<sup>52</sup> Nugroho Notosusanto, *lok. cit.* hal.65

<sup>53</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kotanopan 2013, *lok. cit.* hal. 4

<sup>54</sup> Askolani Nasution, *lok. cit.* hal 5-6

peristiwa sejarah yang berlangsung di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948 menjadi salah satu peristiwa yang memperkuat nilai sejarah Pasanggrahan Kotanopan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian dari ingatan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nilai sejarah tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan Tugu Perintis Kemerdekaan di kawasan Pasanggrahan<sup>55</sup>.

Hingga tahun 2013, Pasanggrahan tidak lagi hanya dipandang sebagai bangunan peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas masyarakat Kotanopan. Meskipun fungsinya mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan setiap periode, nilai sejarah bangunan tetap dipertahankan. Dengan demikian, perubahan fungsi Pasanggrahan menunjukkan adanya proses penyesuaian antara kebutuhan masyarakat pada masa kini dengan upaya mempertahankan nilai sejarah bangunan<sup>56</sup>.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

---

<sup>55</sup> Yulia Nurliani Lukito dan Riski., *lok.cit.*, hal 5

<sup>56</sup> Khoirun Nisa dkk., *op.cit.* hal. 29